

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman, partisipasi perempuan dalam sistem politik dan pemerintah telah memiliki porsi yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang yaitu UU No 2 Tahun 2008 yang berisi tentang pemberian kewajiban pada setiap partai politik untuk memberikan kuota untuk perempuan sebesar 30% di lembaga legislatif. Hal ini sesuai dengan kebijakan PBB bahwa angka minimal untuk memberikan ruang kepada perempuan dalam pengambilan keputusan adalah 30%.¹ Peraturan ini tentu menjadi angin segar bagi seorang perempuan yang dapat menjadi wakil dan representasi oleh perempuan-perempuan lainnya. Sebab, selama beberapa dekade ini isu kesetaraan gender yang masih menjadi hambatan seorang perempuan dalam melakukan aktivitas serta perannya untuk melibatkan diri khususnya di dunia politik dan pemerintahan. Budaya patriarki atau budaya yang menempatkan seorang laki-laki di dalam sistem sosial kemasyarakatan sebagai pemegegang kekuasaan tertinggi masih melekat di lingkup masyarakat Indonesia. Hambatan-hambatan seperti adanya pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, perbandingan pendidikan yang dinilai perempuan lebih memiliki kesempatan yang rendah daripada laki-laki, serta peran perempuan yang selalu dinilai untuk lebih mengurus urusan domestik keluarga dan rumah tangga saja. Dengan adanya peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut juga mengindikasikan bahwa peran keterwakilan perempuan di dalam parlemen juga masih rendah, sehingga perlu adanya kuota sebesar 30% agar perempuan juga dapat menjadi salah satu pengambil keputusan dan mewakili aspirasinya.² Bahkan setelah adanya peraturan yang telah dibuat tersebut tidak memberikan hasil yang cukup memuaskan, sebab di beberapa daerah pun kuota tersebut tidak

¹ <https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum- pernah-tercapai-cv8q>

² Muhandis Azzuhri, 2011. Pemberdayaan Perempuan dalam Membangun Budaya Anti Korupsi. Jurnal Muwazah Vol.3 No 2.

sepenuhnya terpenuhi. Hal ini juga disebabkan stigma-stigma yang masih sangat melekat di lingkungan masyarakat, bahwa seorang perempuan tidak bisa terjun ke dunia politik.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir tingkat keaktifan dan partisipasi perempuan untuk ikut andil dalam dunia politik maupun pemerintahan cukup menunjukkan peningkatan. Salah satu cara dan strategi dalam menyampaikan tujuan tersebut adalah melalui pendidikan politik. Pendidikan politik di kalangan perempuan ini menjadi momentum mulai bermunculan kesadaran seorang perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai perempuan agar mendapatkan kesetaraan dengan laki-laki. Oleh karena itu, dengan seiring berjalannya waktu hadir berbagai organisasi masyarakat, komunitas dan gerakan-gerakan yang beranggotakan perempuan bertujuan sebagai memperjuangkan hak-hak perempuan sekaligus penyadaran kepada perempuan lainnya supaya dapat berjuang memenuhi hak tersebut. Melalui organisasi ini dapat mendorong perempuan-perempuan agar semakin aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan dan bersosialisasi bersama masyarakat. Selain itu, melalui media ini perempuan dapat lebih terbuka dan berani dalam menyuarakan aspirasi terhadap suatu isu atau kebijakan baik dalam lingkungan sekitar maupun pemerintahan. Oleh karena itu, dengan adanya kehadiran organisasi, komunitas dan gerakan dari kalangan perempuan peran serta keterwakilan dalam memperjuangkan tujuannya semakin besar dan luas. Maka, kesempatan untuk ikut campur dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan oleh pemerintah dapat melibatkan seluruh pihak tanpa memandang gender.

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik yang saat ini semakin berkembang dan mengalami peningkatan dari segi kuantitas memang patut diapresiasi, tetapi hal ini juga tidak diimbangi dengan pengetahuan serta wawasan bagi kalangan perempuan ketika terjun ke dalam dunia politik, apalagi berdekatan dengan perilaku korupsi. Maka yang menjadi pertanyaan sampai hari ini adalah apakah kuantitas peningkatan ini telah diimbangi dengan kualitas dari masing-masing individu tersebut. Hal inilah yang

membuat fenomena baru yaitu perempuan terjerat dalam pusaran korupsi mulai bermunculan. Meskipun perilaku korupsi adalah perilaku *genderless* atau dapat menimpa siapa saja tanpa melihat jenis kelamin, tetapi karena adanya peran yang mulai menonjol dari kalangan perempuan tetapi tidak diimbangi oleh wawasan dan pengetahuan dalam dunia politik yang bisa menjerumuskan pada perilaku korupsi tersebut. Dalam kasus korupsi, perempuan tidak hanya dapat menjadi seorang pelaku saja tetapi juga korban dari perilaku tersebut. Contohnya perempuan menjadi objek gratifikasi, seringkali perempuan dinilai menjadi alasan seorang suami atau laki-laki untuk melakukan korupsi sebab ingin memberikan hadiah atau hiburan kepada istrinya. Akibat dari kurangnya wawasan dan ilmu pengetahuan dari kalangan perempuan akan dunia pemerintahan menjadikan kalangan perempuan lebih termarginal dalam isu-isu dan kebijakan sosial.³

Permasalahan negara yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi negara-negara di seluruh dunia adalah memberantas perilaku korupsi. Tak terkecuali di Indonesia yang juga sampai saat ini masih dalam usaha memberantas perilaku yang sangat merugikan bagi negara dan masyarakat. Korupsi bukanlah menjadi suatu fenomena baru, tetapi permasalahan ini telah muncul sejak era orde baru. Sehingga seringkali korupsi telah disebut sebagai kultur budaya yang telah mengakar dan terus menerus masih dijumpai di masyarakat khususnya bagi pejabat-pejabat publik pemilik kekuasaan di pemerintahan. Tahun 2010 Lembaga Political and Economic Risk Consultant (PERC) menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di kawasan Asia Pasifik, dengan dibawahnya terdapat negara-negara seperti Filipina, Kamboja, Vietnam, Thailand dan India.⁴ Hal ini pun juga berdasarkan bahwa fakta kasus tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun justru semakin bertambah, dapat dilihat bahwa Berdasarkan data dari Anti corruption Clearing House (ACCH), penanganan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 terus

³ Alatas, 1987. Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi. Jakarta: LP3ES.

⁴<https://nasional.kompas.com/read/2010/03/08/21205485/PERC.Indonesia.Negara.Paling.Korup>

meningkat. Sepanjang tahun 2015 hingga 2018 terdapat 1.952 perkara. Per 31 Desember 2018, KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian yakni penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara.⁵ Maka berdasarkan fakta ini, Indonesia berada semakin di ujung tanduk sebab pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi sampai saat ini masih belum menemukan solusi yang tepat untuk dapat memberantas korupsi.

Dalam waktu kurang lebih satu dekade ini baik Pemerintah Indonesia maupun lembaga-lembaga Internasional menjadikan korupsi sebagai isu utama sebagai tindakan kejahatan yang paling merugikan negara. Dimulai dari Pemerintah Indonesia di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang mengeluarkan Kepres mengenai percepatan penanganan pemberantasan korupsi dan sejumlah langkah kebijakan lainnya. Berbagai peraturan yang muncul dan diterbitkan tidak memiliki dampak yang signifikan untuk memberantas perilaku korupsi. Program Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (STRANAS-PK) dalam pelaksanaannya pun gagal dalam melakukan pencegahan anti korupsi di lingkungan masyarakat. Pemerintah mempunyai peran sebagai kontrol pengawasan dalam pengelolaan sebuah negara, telah membentuk lembaga yang khusus bertindak dalam pengawasan tindak korupsi masih belum dapat mengurangi jumlah kasus korupsi di Indonesia. Kehadiran lembaga KPK pun belum dapat membantu pengurangan jumlah kasus korupsi, melainkan terbentuknya lembaga KPK hanya menjadi sosok untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan bagi para koruptor tanpa adanya solusi bagaimana tindakan dalam pencegahan perilaku korupsi dari akar rumput masyarakat. Apabila melihat tingkat pemerintah belum dapat menuntaskan pemberantasan jumlah korupsi, maka peran masyarakat yang menjadi harapan dalam berpartisipasi untuk ikut memberantas perilaku korupsi.

⁵<https://acch.kpk.go.id/id/jejak>

Terlihat dari beberapa perempuan di Indonesia yang berhasil menduduki jabatan-jabatan strategis seperti menteri, kepala daerah, anggota dewan dan lain-lain, tetapi masih belum bisa beradaptasi dengan dunia yang baru dan mudah sekali untuk dijebak dalam pusaran dunia korupsi. Angelina Sondakh, Neneng Hassanah Yasin, Rita Widyasari, Siti Masitha, Atty Suharti, Sri Hartini, Ratu Atut Chosiyah, Vonnie Anneke Panambunan, Sri Wahyumi Maria Manalip merupakan sebagian nama-nama pelaku kasus korupsi yang telah memiliki jabatan sebagai anggota dewan di parlemen, kepala daerah (walikota, gubernur, bupati) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan motif-motif yang berbeda. Sehingga dalam permasalahan sosial ini, korupsi telah mengakar menjadi sebuah budaya yang tidak memandang gender, dan tidak memandang siapa yang menjadi pelaku atau korban lagi, tetapi perilaku ini dapat menjadi kerugian bagi seluruh pihak. Oleh karena itu, edukasi pada masyarakat dengan dorongan dari lembaga-lembaga Pemerintahan atau dari kalangan masyarakat sangat dibutuhkan untuk bersama-sama berperang melawan korupsi. Kehadiran gerakan dan komunitas dari sisi masyarakat menjadi sebuah aksi kolektif bersama agar bisa memberikan penyadaran dan desakan kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang efektif dan efisien dalam berbagai permasalahan sosial. Adanya gerakan ini dapat memberikan fungsi advokasi dalam permasalahan sosial agar menjadi prioritas pemerintahan untuk dapat ditemukan solusinya, khususnya masalah korupsi. Kemunculan gerakan sosial di tengah-tengah masyarakat merupakan suatu kontrol dari luar sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat (civil society) untuk menumbuhkan aktivisme gerakan sosial.⁶

Gerakan sosial lahir dari sekelompok masyarakat yang berusaha untuk menolak atau mendukung adanya suatu perubahan sosial dalam tatanan masyarakat. Gerakan sosial dapat di latar belakang oleh berbagai faktor, seperti isu sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain. Salah satunya adalah

⁶ Damsar. 2002. Sosiologi Ekonomi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

gerakan sosial di bidang anti korupsi. Malang Corruption Watch merupakan gerakan sosial kemasyarakatan berbasis anti korupsi di kota Malang. Gerakan MCW ini fokus pada gerakan sipil yang dilakukan oleh masyarakat melalui media pencegahan anti korupsi seperti monitoring, investigasi, kampanye, pendidikan publik, dan advokasi kasus-kasus korupsi yang terjadi di wilayah Malang dan Batu sekitarnya. Kehadiran gerakan masyarakat ini adalah sebagai wujud bagian demokratisasi dalam sistem politik dan ekonomi sehingga mampu tercipta lingkungan masyarakat yang lebih adil, humanis dan berdaulat. Ciri khas dari gerakan MCW ini adalah partisipasi langsung dengan masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan yaitu pendidikan politik rakyat, sekolah rakyat, forum warga, kelompok warga mengawal pelayanan publik, mengkampanyekan gerakan anti korupsi dan sekolah anti korupsi.⁷ Gerakan sosial berbasis anti korupsi juga ada di Yogyakarta yaitu Satgas Muda Anti Korupsi. Satgas Muda Anti Korupsi merupakan salah satu organisasi gerakan pencegahan anti korupsi di Yogyakarta yang diisi oleh pemuda-pemuda bangsa yang berkomitmen untuk membangun karakter pribadi anti korupsi. Gerakan ini muncul pada tahun 2013 karena keresahan para generasi muda terhadap permasalahan korupsi yang semakin merajalela di Indonesia. Bentuk kegiatan dari gerakan ini adalah melakukan sosialisasi rutin bertemakan pendidikan anti korupsi dan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pemerintahan. Tujuan gerakan ini adalah menumbuhkan sikap kepekaan sosial masyarakat terhadap permasalahan korupsi adalah permasalahan bersama, sehingga masyarakat diajak untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan pencegahan korupsi dalam lingkup kota Yogyakarta.⁸

Pada 2014, muncul sebuah gerakan sosial atas dorongan dari Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi yang biasa disingkat SPAK, sesuai dengan nama gerakan ini diisi oleh

⁷ <https://mcw-malang.org/>

⁸ Mifdal Zusron dkk. 2017. Peran Pemuda dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah. Jurnal Ketahanan Nasional Volume 23, Halaman 320-337.

kalangan perempuan dari berbagai latar belakang profesi dan pekerjaan. Tujuan utama dari lahirnya gerakan ini adalah mengkampanyekan dan memberikan edukasi anti-korupsi di lingkungan perempuan, sehingga basis gerakan sosial ini adalah pada pencegahan perilaku korupsi melalui pendidikan dan penyadaran moral individu. Melihat perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia yang belum menunjukkan perubahan yang signifikan, maka gerakan ini muncul dengan harapan dapat memberantas tindakan korupsi melalui pencegahan lewat perempuan sebagai pelaku gerakan. Gerakan ini dideklarasikan pada 22 April 2014. Gerakan ini muncul atas beberapa alasan yang berkaitan dengan perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Gerakan ini menyorot pada peran sosial perempuan baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan berbagai komunitas. Konsep yang dibawa oleh Gerakan SPAK pada kampanye anti korupsinya adalah membuka pandangan dan pemikiran masyarakat khususnya perempuan supaya lebih sadar mengenai pentingnya memberantas perilaku korupsi dan seorang perempuan mampu menjadi agen anti-korupsi yang terlibat pada kampanye anti-korupsi antar individu maupun komunitas, organisasi perempuan di Indonesia.⁹ Dalam perkembangannya, Gerakan ini kemudian dibantu oleh Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama (DWP Kemenag). Kementerian Agama dianggap menjadi kementerian dengan nilai integritas yang rendah dibandingkan kementerian lain, sehingga agen SPAK mensosialisasikan pada organisasi DWP itu sendiri serta melalui keluarga dan lingkungan yang berada di sekitarnya. Gerakan SPAK memfokuskan pada peran aktif dari setiap agennya yaitu dengan mendorong perubahan dari tingkat pengetahuan, intelektual, perilaku sampai berusaha turut andil dalam perubahan sistem.¹⁰

Gerakan ini diciptakan khusus bagi perempuan, sebab perempuan sebagai ibu merupakan figur yang sentral di lingkungan keluarga, karena

⁹https://www.researchgate.net/publication/326142512_PEREMPUAN_DALAM_KAMPANYE_ANTI_KORUPSI

¹⁰<https://jateng.kemenag.go.id/warta/berita/detail/gerakan-spak-saya-perempuan-anti-korupsi-pencegah-dan-pengontrol-korupsi-pada-asn-kemenag>

pendidikan moral pertama kali diajarkan di lingkungan keluarga. Perempuan sebagai ibu memiliki karakter seperti melahirkan, mengembangkan dan bertanggung jawab atas perkembangan dan pertumbuhan seorang anak. Selain itu, perempuan juga mampu melakukan kontrol sosial dengan bersosialisasi dengan perempuan lain. Sosialisasi ini dapat berupa pengajian, arisan, pertemuan orangtua di sekolah, kursus-kursus masak atau merajut dll, bisnis-bisnis rumahan seperti jilbab; baju muslim, dll, semuanya lebih banyak melibatkan lebih banyak perempuan. Fakta sosial inilah juga menjadi salah satu faktor bahwa perempuan saat ini memiliki andil yang besar dalam setiap pengaruh sosial yang berada disekitarnya. Dalam sebuah artikel yang dibuat oleh Anti Corruption Clearing House, gerakan SPAK ini dilatar belakangi oleh survey yang telah dilakukan oleh KPK pada tahun 2012-2013 di kota Solo dan Yogyakarta. Hasil dari survey tersebut menunjukkan bahwa ternyata hanya 4% orang tua yang mengajarkan dan memberikan pemahaman sifat kejujuran pada anak sejak dini. Dari fakta tersebut, KPK mendapatkan sebuah jawaban bahwa di lingkungan keluarga penanaman sifat kejujuran masih belum cukup diterapkan, padahal karakter seorang anak akan terbentuk sejak berada di lingkungan keluarga. Lantas, dengan adanya fakta ini menunjukkan bahwa peran dari seorang perempuan atau ibu masih dianggap menjadi figur yang sentral di lingkup keluarga dalam memberikan pendidikan moral kepada anak. Kemudian alasan ini yang menjadi landasan dari sebuah gerakan ini dapat lahir. Ciri khas yang diajarkan oleh Gerakan SPAK kepada masyarakat adalah penyampaian materi dengan media alat permainan hasil dari ciptaan anggota Gerakan SPAK. Alat permainan ini akan digunakan saat pelatihan dan para agen diperkenalkan mengenai permainan yang diisi oleh 9 nilai-nilai yang telah dipilih KPK yaitu kejujuran, keadilan, kemandirian, bertanggung jawab, keberanian, kegigihan, kerjasama, kepedulian, kedisiplinan.¹¹ Keberhasilan gerakan ini juga dapat dilihat ketika mendapat penghargaan dari Anti-Corruption Excellence (ACE) Award 2017 untuk kategori anti-

¹¹<https://acch.kpk.go.id/id/berkas/saya-perempuan-antikorupsi/mengenal-gerakan-saya-perempuan-anti-korupsi-spak>

corruption youth creativity and engagement. ACE Award adalah penghargaan dari Rule of Law and Anti-corruption Center (ROLLAC) yang berkedudukan di Qatar, bekerjasama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Gerakan SPAK dapat menerima penghargaan ini sebab telah mampu mencapai dan menanamkan nilai-nilai karakter kejujuran pada anak sejak dini.¹²

Pemerintah juga mendukung pencegahan korupsi dengan cara pencegahan, salah satu bukti konkrit yang telah dijalankan adalah melalui metode pendidikan anti korupsi. memberikan pendidikan anti-korupsi bagi masyarakat. Pada tahun 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama menyepakati dan menandatangani Komitmen Implementasi Pendidikan Anti-Korupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Komitmen ini bentuk dari salah satu upaya pencegahan korupsi dengan mendorong diimplementasikannya pendidikan anti-korupsi di setiap jenjang. Pendidikan anti korupsi disini bukan hanya terkait siswa atau pelajar, melainkan juga guru, dosen, pegawai dan komponen di institusi pendidikan lainnya. Bukti dari komitmen ini adalah sudah diterapkannya pembelajaran anti korupsi di lingkungan perguruan tinggi, misalnya di Institut Teknologi Bandung (ITB) yang memiliki komunitas dosen dengan kebijakan apabila terdapat mahasiswa yang menyontek akan diskors satu semester. Universitas Bina Nusantara juga menyatakan apabila terdapat alumninya yang terjerat kasus korupsi, maka ijasanya akan ditarik. Sampai pada tahun 2018, Kementerian Ristekdikti telah melakukan pelatihan bagi ribuan dosen dari berbagai bidang ilmu di seluruh Indonesia, serta berbagai kampus baik negeri maupun swasta yang terlibat dalam ToT (Training of Trainer).¹³

¹²<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171209173631-20-261334/saya-perempuan-anti-korupsi-raih-penghargaan-internasional>

¹³<https://www.ristekdikti.go.id/kabar/pendidikan-anti-korupsi-akan-diterapkan-di-semua-jenjang-pendidikan-2/>

“Pendidikan yang paling utama adalah bagaimana mengubah karakter seorang anak, sebab hal ini adalah modal dasar bagi anak untuk bersikap disiplin dan jujur. Pendidikan karakter itu harus diterapkan sedini mungkin, karena menghilangkan niat jahat itu tidak bisa satu atau dua tahun. Sehingga baik buruknya anak bergantung pada pertumbuhannya sejak kecil. Maka hal ini baik dikenalkan dan diajarkan sedini mungkin. Meskipun hal ini sederhana, namun dampaknya akan terlihat dan melekat pada saat mereka besar nanti,” ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan.

14

Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi telah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya di Surabaya. Pemilihan kota Surabaya sebagai subyek penelitian pada tulisan ini dikarenakan Kota Surabaya dipilih sebagai salah satu kota yang juga memiliki banyak agen anggota di gerakan ini sebab kasus korupsi yang masih menjerat birokrasi baik eksekutif dan legislatif di kota ini. Baru-baru ini sekitar awal tahun 2020, Lembaga Anti Korupsi East Java Corruption and Judicial Watch Organization melaporkan sejumlah temuan kasus korupsi di Surabaya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua ECJWO, Miko menyatakan bahwa sesuai dengan visi dan misi lembaga ini untuk menjaga Surabaya agar bersih dan bebas dari korupsi, serta adanya komitmen dari KPK untuk mendorong masyarakat agar ikut bekerjasama dalam memberantas korupsi bersama-sama, maka ECJWO telah menyiapkan berkas-berkas yang telah dikumpulkan mulai tahun 2015 hingga saat ini yang menyeret berbagai pihak dalam pusaran korupsi di Surabaya.¹⁵ Komitmen dari salah satu lembaga ini karena melihat penanganan dan penyelidikan kasus korupsi di Surabaya tidak jelas arahnya dan simpang siur, sehingga membuat masyarakat geram karena tidak ada tindak lanjut tegas dan penyelesaian dari pihak terkait. Selama ini Surabaya juga dinilai sebagai kota yang bersih dari korupsi sebab berbagai strategi yang dilakukan pemerintah

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ <https://rmojatim.id/2020/07/09/tanyakan-hasil-penyelidikan-empat-mega-kasus-korupsi-di-surabaya-ecjwo-kembali-datangi-kpk>

kota Surabaya dalam penanganan kasus korupsi sangat baik. Oleh karena itu, meskipun dari Pihak Pemkot Surabaya telah mengklaim menjadi salah satu kota yang terintegritas di Indonesia, namun pada faktanya kasus korupsi masih terjadi di Surabaya. Bahkan Provinsi Jawa Timur masuk ke dalam 5 besar tertinggi kasus korupsi setelah DKI Jakarta. Sehingga, Kota Surabaya masih menjadi ¹⁶

Tak terkecuali kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bekerja dengan SPAK Indonesia dalam membuat kurikulum pendidikan anti korupsi dengan cara menerapkan kurikulum ini dalam pelajaran PPKN bagi siswa tingkat SD dan SMP di Surabaya. Penerapan kurikulum ini adalah bentuk tindak lanjut dari Pendidikan anti korupsi yang telah dijalankan oleh KPK dengan tujuan mengenalkan pendidikan anti korupsi melalui metode pendidikan dari mata pelajaran yang disampaikan, sehingga pelajaran ini dapat menjadi pembentukan karakter sejak dini.¹⁷ Selain itu, SPAK Indonesia juga pernah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya yaitu melalui Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada tahun 2016 dengan membagikan 1000 modul anti korupsi berupa alat permainan kepada 1000 guru PAUD se-Surabaya dan akan disebar di seluruh perpustakaan-perpustakaan Surabaya. Kerjasama antara KPK, SPAK Indonesia dengan Pemerintah Kota Surabaya ini dilatarbelakangi karena memang mempunyai visi yang sama yaitu menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini kepada anak-anak untuk kedepannya mereka akan terbiasa berbuat jujur serta membentuk sikap positif bagi generasi Indonesia yang akan datang. Akhir tahun 2019, Pemerintah Kota Surabaya bersama Gerakan SPAK dan KPK kembali meluncurkan Program “Guru Pembangunan Peradaban”. Program ini lanjutan dari kerjasama kurikulum anti korupsi yang

¹⁶<https://kabarjatim.com/ecjwo-lapor-kpk-dugaan-kasus-mega-korupsi-di-surabaya/>

¹⁷<https://kumparan.com/kumparanmom/keren-surabaya-siap-beri-pendidikan-antikorupsi-di-sekolah-1rSw6kihMa>

telah disepakati. Program ini adalah pelatihan kepada seribu guru di Surabaya sebelum mengajarkan pendidikan karakter anti korupsi kepada anak-anak.¹⁸

Munculnya fenomena gerakan sosial yang beranggotakan perempuan ini merupakan angin segar bagi perkembangan gerakan sosial dalam pencegahan anti korupsi khususnya di Indonesia. Sebab selama ini perempuan masih dianggap kurang memiliki peran dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dengan adanya gerakan sosial ini diharapkan kedepannya peran serta kesadaran perempuan dalam lingkungan sosial atau politik terus meningkat. Selain itu, dengan bangkitnya perempuan serta gerakan perempuan dapat memberikan sumbangan yang substansial dalam pemecahan masalah bangsa sekaligus untuk memperjuangkan hak-hak dan gender. Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi ini hadir dengan membawa tujuan untuk memberikan pencegahan sejak dini melalui basis beranggotakan perempuan supaya mampu mempunyai karakter jujur dan anti korupsi. Gerakan ini juga terbilang masif sejak pertama kali didirikan dengan terus berupaya meluncurkan program-program yang efektif dan menarik untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah di bidang pendidikan anti korupsi. Di Surabaya, SPAK telah beberapa kali melakukan kerjasama untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi bagi pelajar di sekolah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan mencari tahu bagaimana proses terbentuknya gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi dan bagaimana dinamika gerakan ini di dalamnya, serta apa yang melatar belakangi gerakan ini dalam mewujudkan pendidikan anti korupsi, dan bagaimana hasil yang telah dicapai selama gerakan ini telah muncul.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut:

¹⁸<https://surabaya.bisnis.com/read/20190820/531/1138961/pemkot-surabaya-rumuskan-kurikulum-pendidikan-antikorupsi-untuk-sd-smp/>

1. Apa yang menjadi latar belakang pembentukan Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi?
2. Bagaimana mengembangkan dan mengorganisasikan jaringan Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi?
3. Bagaimana hasil yang telah dicapai Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi dalam mewujudkan Pendidikan Anti Korupsi di Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang dari pembentukan Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi.
2. Mengetahui bagaimana cara mengembangkan dan mengorganisasikan jaringan Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi.
3. Mengetahui hasil yang telah dicapai dari Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi dalam mewujudkan pendidikan anti korupsi di Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat-manfaat bagi penulis, akademisi maupun masyarakat. Berikut ini adalah manfaat-manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini, yaitu :

1.4.1 Manfaat Akademis

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan pemikiran terhadap sebuah pandangan politik dalam suatu gerakan sosial, khususnya gerakan perempuan serta dapat menjadi bahan rujukan untuk mempelajari disiplin ilmu politik dan ilmu pengetahuan yang lain dengan melihat fenomena dari gerakan perempuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk memberikan informasi dan menambah wawasan dalam melihat

gerakan sosial dan politik. Selain itu dapat memberikan referensi oleh masyarakat dalam melihat gerakan sosial dan politik.

1.5 Teori Gerakan Sosial

Gerakan sosial atau *social movement* merupakan alat penting untuk mewujudkan perubahan sosial ketika masyarakat secara kolektif dihadapkan pada berbagai permasalahan sosial yang terjadi di sekitar kita. Teori gerakan sosial banyak dibahas oleh ilmuwan dunia seperti Greene, Tarrow dan lain-lain. Menurut Greene, gerakan sosial adalah perilaku kolektif yang telah bertahan cukup lama, tersruktur dan rasional. Beberapa karakteristik dari gerakan sosial menurut Greene adalah meliputi beberapa jumlah orang, memiliki tujuan umum untuk mendukung atau mencegah suatu perubahan sosial dan memiliki struktur dengan kepemimpinan yang telah diakui oleh umum dan di dalam gerakan tersebut terdapat suatu aktivitas yang bertahan dalam kurun waktu cukup lama. Gerakan sosial relatif lebih permanen dan terorganisir dibandingkan perilaku kolektif lainnya. Sementara Tarrow menyatakan bahwa gerakan sosial adalah upaya mencapai tujuan tertentu melalui tindakan yang menentang status quo, wewenang dan budaya yang telah ada. Menurutnya, orang-orang yang tergabung dalam suatu gerakan sosial akan terbentuk perasaan identitas kolektif, yaitu saling membagi perasaan bersama tentang penyebab dan membantu usaha-usaha mereka dengan mempertahankan suatu gerakan. Adapun Locher berpendapat bahwa ketika sekelompok orang mengatur dan mengorganisir diri dalam wujud upaya untuk mendorong atau menolak beberapa jenis perubahan sosial, maka hal ini yang disebut gerakan sosial. Gambaran dari Locher adalah orang-orang dengan sedikit atau banyak kekuatan politiknya akan bergabung secara bersama-sama untuk mendapatkan dan memperjuangkan beberapa hal yaitu perubahan sosial.¹⁹

¹⁹ Sukmana, Oman. 2016. Konsep dan Teori Gerakan Sosial. Malang: Intrans Publishing. Hlm 5.

Pada umumnya terdapat beberapa studi-studi tentang gerakan sosial, namun di Indonesia secara umum banyak memakai pandangan dari Signh. Menurut Signh (2001:111) secara umum teori gerakan sosial diklasifikasikan menjadi 3 bagian yaitu klasik, neo-klasik dan gerakan sosial baru (kontemporer). Gerakan sosial tradisi klasik meliputi studi mengenai perilaku kolektif seperti crowd (kerumunan), kerusuhan, dan penolakan atau pembangkangan. Dalam masa ini studi utama yang dipakai adalah tradisi psikolog sosial klasik. Sementara pada tradisi neo-klasik terbagi dalam dua model, yaitu gerakan fungsional dan dialektika marxis. Sedangkan gerakan sosial baru atau kontemporer mendasarkan pada isu-isu humanis, kultural dan non materialistik. Tujuan dan nilai dari gerakan ini adalah universal, yaitu untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan kondisi kehidupan manusia ke arah yang lebih baik.²⁰

1.5.1 Tipologi Gerakan Sosial

Blumer (2005:189) mengelompokkan gerakan sosial ke dalam dua tipe, yakni gerakan sosial umum dan gerakan sosial khusus. Gerakan sosial umum adalah gerakan dalam perubahan nilai-nilai di masyarakat, misalnya upaya gerakan perempuan dalam melakukan perubahan tentang status dan pandangan terhadap kaum perempuan. Sedangkan, gerakan sosial khusus merupakan gerakan yang memiliki fokus lebih jelas dan spesifik. Berdasarkan sasaran perubahan dan jumlah besarnya perubahan, maka gerakan sosial dapat dikelompokkan menjadi empat tipe yaitu :

1. Gerakan sosial alternatif adalah gerakan sosial yang tingkat ancamannya terhadap status quo sangat kecil karena sasaran dari gerakan sosial adalah suatu perubahan yang terbatas terhadap sebagian populasi.
2. Gerakan sosial pembebasan adalah gerakan sosial yang memiliki fokus selektif tetapi ditujukan terhadap perubahan yang radikal (lebih mengakar) pada individu.

²⁰ *Ibid.* Hlm 8.

3. Gerakan sosial reformasi adalah gerakan sosial yang ditujukan hanya untuk suatu perubahan sosial yang terbatas terhadap setiap orang, umumnya terjadi pada suatu sistem politik. Tipe gerakan ini sangat progresif dan bersifat reaktif.
4. Gerakan sosial revolusi adalah gerakan sosial yang ekstrim yaitu bertujuan untuk sebuah transformasi dasar dari seluruh masyarakat.

Sementara berdasarkan tujuan ideologinya, Zanden (1998:575) mengelompokkan gerakan sosial ke dalam empat tipe yaitu :

1. Gerakan revolusi ditujukan untuk menggantikan nilai-nilai yang sudah ada.
2. Gerakan reformasi ditujukan untuk mengadakan perubahan agar nilai-nilai yang ada dapat diterapkan atau diimplementasikan lebih kuat lagi.
3. Gerakan perlawanan ditujukan untuk mencegah, menolak suatu perubahan atau menghilangkan perubahan sebelum dilembagakan.
4. Gerakan ekspresif adalah tipe gerakan yang kurang memperhatikan perubahan, tetapi lebih memperhatikan adanya perubahan dengan cara renovasi atau pembaharuan.

Sementara berdasarkan tujuannya, Spencer (1982:506) membagi ke dalam tujuh tipe gerakan sosial, yaitu :

1. Gerakan revolusi adalah gerakan yang dramatis, berusaha untuk menggulingkan otoritas yang telah ada, dan apabila mungkin dapat menggunakan cara kekerasan, misalnya gerakan bersenjata.
2. Gerakan reformasi adalah memperbaiki persoalan-persoalan yang muncul, misalnya gerakan perempuan dan gerakan sipil.
3. Gerakan reaksi adalah gerakan yang menginginkan situasi kehidupan dikembalikan kepada tatanan sebelumnya, karena dianggap yang lama lebih baik dibandingkan tatanan yang sekarang.
4. Gerakan konservatif adalah gerakan untuk mempertahankan dan menjaga nilai-nilai tata cara kehidupan mereka, misalnya mempertahankan

bangunan lama dan memperlambat laju pertumbuhan dan perubahan kota besar.

5. Gerakan utopia adalah gerakan yang bertujuan untuk jangka panjang yaitu menginginkan suatu tipe baru dari suatu masyarakat yang berbeda dengan saat ini.
6. Gerakan religius adalah gerakan yang bertujuan religius, misalnya gerakan mistik.
7. Gerakan etnis atau nasionalis adalah gerakan yang membuat suatu perubahan sosial di seluruh dunia, misalnya The Cikano, Black dan American Indian Movements.

1.5.2 Tahap-tahap Gerakan Sosial

Menurut Macionis (1999:623) membagi tahapan ke dalam empat proses gerakan sosial, yakni :

1. Emergence (Tahap Kemunculan)

Gerakan sosial didorong oleh suatu persepsi bahwa segalanya tidak baik, berawal dari wujud ketidak puasaan di lingkungan sekitar. Namun, gerakan-gerakan lainnya juga muncul sebagai kesadaran yang dipelopori oleh kelompok-kelompok kecil dengan beberapa isu tertentu.

2. Coalescence (Tahap Penggabungan)

Setelah muncul adanya tujuan dari gerakan sosial tersebut, maka selanjutnya adalah mengembangkan strategi untuk menuju publik. Seorang pemimpin gerakan harus menentukan kebijakan, memutuskan suatu taktik, membangun moral, dan melakukan rekrutmen anggota baru. Dalam fase ini gerakan sosial dapat melakukan cara untuk mendapat perhatian massa dan publik. Gerakan juga perlu membentuk aliansi untuk mendapatkan sumberdaya yang diperlukan.

3. Bureaucratization (Tahap Birokratisasi)

Gerakan akan menjadi sebuah gerakan yang mapan ditinjau dari kharisma seorang pemimpinnya, sehingga perlu memiliki sifat-sifat birokrasi. Apabila tidak tercapai, maka gerakan sosial akan beresiko mudah hilang.

4. Decline (Tahap Penurunan/Kemunduran)

Pada akhirnya, suatu gerakan sosial akan kehilangan pengaruhnya. Ada beberapa alasan mengapa gerakan sosial dapat mengalami kemunduran, menurut Macionis (1993:623) yaitu ketika suatu gerakan sosial dianggap telah berhasil dalam mencapai tujuannya, karena adanya kelemahan atau pertentangan dalam internal organisasi, adanya kooptasi atas para pemimpin gerakan, adanya tekanan dari pihak eksternal, dan suatu gerakan dapat masuk ke dalam pengarusutamaan, sehingga tidak ada tantangan atas status quo.

Adapun Hanselin juga menjelaskan dan membagi tahapan dari gerakan sosial ke dalam beberapa bagian ²¹ yaitu :

1. Tahap kerusuhan dan agitatif. Bermula dari sekelompok orang yang merasa terganggu oleh kondisi tertentu dan hendak mengubahnya. Muncul seorang pemimpin yang mampu menerjemahkan perasaan orang-orang ke dalam bentuk wacana yang menyangkut sejumlah isu yang berhubungan dengan sebab ketergantungan tersebut.
2. Tahap mobilisasi sumber daya. Tahapan ini adalah apabila mampu memobilisasi sumber daya seperti waktu, dana, keterampilan orang dan untuk mendapat perhatian massa.
3. Tahap pengorganisasian. Tahapan ini ditandai dengan adanya pembagian kerja. Pemimpin memutuskan suatu kebijakan, dan anggota melaksanakan tugas sehari-hari yang diperlukan agar gerakan tetap berjalan.
4. Tahap institusionalisasi. Gerakan mengembangkan suatu birokrasi. Kontrol berada di tangan pejabat, yang mementingkan kepentingan atau posisi mereka dibandingkan tujuan gerakan tersebut.
5. Tahap kemunduran dan kemungkinan kebangkitan kembali. Gerakan ditandai dengan perubahan sentimen politik, tidak ada lagi kelompok yang memiliki komitmen kuat dan berbagi suatu tujuan bersama. Gerakan sosial dapat berpeluang redup dan terus menghilang. Pada saat redup

²¹ Damsar. 2010. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Kencana. Hlm 136-137.

dimungkingka muncul pemimpin yang lebih ideal dan berkomitmen tinggi untuk menyegarkan gerakan.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Gerakan Sosial

Gerakan sosial banyak sekali dikemukakan oleh para ahli, beberapa diantaranya adalah menurut James M. Henselin, gerakan sosial adalah sejumlah orang yang berorganisasi untuk mempromosikan atau menentang perubahan. Sementara Paul B. Horton dan Chester L. Hunt mendefinisikan Gerakan sosial adalah suatu usaha kolektif yang bertujuan untuk menunjang dan menolak perubahan. Adapun Kamanto Sunarto menjelaskan Gerakan sosial adalah perilaku kolektif yang memiliki tujuan jangka panjang untuk mengubah atau mempertahankan masyarakat atau institusi yang ada di dalamnya. Kesimpulannya adalah gerakan sosial suatu perubahan dalam masyarakat, seperti gerakan anti rokok, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), pornografi dan sebagainya atau berbagai macam gerakan demokrasi, lingkungan bersih, penegakan HAM dan lain-lain. Adapun beragam gerakan pemberdayaan dan advokasi seperti petani, buruh, nelayan, gender, anak dan lain-lain.²²

Gerakan sosial dimaknai sebagai kolektivitas-kolektivitas dengan tujuan memberi tuntutan dan mempertahankan sebuah otoritas, baik secara institusional maupun kultural yang ada dalam kelompok, organisasi, masyarakat atau kebudayaan. Konsep gerakan sosial ini meliputi lima hal agar dapat dianggap sebagai gerakan sosial yaitu tindakan kolektif atau gabungan, tujuan yang berorientasi pada perubahan, tindakan kolektif yang institusional maupun non-institusional, relasi dalam organisasi, dan berkelanjutan. Gerakan sosial baru dimaknai dengan sifat plural.²³ Gerakan sosial baru muncul seiring dengan perubahan bentuk masyarakat.

²² Damsar. 2010. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Kencana. Hlm 130-131.

²³ Haryanto, dkk. 2013. PKBI: Aktor Intermediary dan Gerakan Sosial Baru. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 16, Nomor 03. 187-199

Perkembangan masyarakat kekinian tentu juga menjadi pertimbangan perihal bagaimana mengamati bentuk gerakan sosial yang muncul, strategi yang digunakan, serta visi dan perubahan yang ingin dicapai.²⁴

Lalu definisi gerakan sosial juga muncul dari Tarrow yang menempatkan gerakan sosial sebagai politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa yang bergabung dengan para kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya. Konsep gerakan sosial yang didefinisikan oleh Tarrow tersebut memiliki perbedaan dengan apa yang diutarakan oleh Giddens bahwa yang dimaksud dalam gerakan sosial dalam perspektif Tarrow ini adalah dia lebih memfokuskan pada aspek sosial politik dimana dalam pernyataannya gerakan sosial ia definisikan sebagai sebuah tindakan perlawanan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau warga biasa yang bergabung dan membentuk alienasi dengan para tokoh atau kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam suatu negara, kelompok atau semacamnya bersama-sama bergerak untuk melakukan suatu perlawanan terhadap para pemegang kekuasaan atau para elit politik jika apa yang menjadi sebuah kebijakan dirasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Masih dalam konteks gerakan sosial dari Tarrow, tindakan yang didasari politik perlawanan adalah aksi kolektif yang melawan (*contentious collective action*).²⁵

Tindakan kolektif bisa mengambil banyak bentuk, yang singkat maupun yang berkelanjutan, terlembaga atau cepat bubar, membosankan atau dramatis. Umumnya tindakan kolektif berlangsung dalam institusi ketika orang-orang yang tergabung di dalamnya bertindak untuk mencapai tujuan bersama. Aksi kolektif memiliki nuansa penentangan ketika aksi itu dilakukan oleh orang-orang yang kurang memiliki akses ke institusi-institusi untuk mengajukan klaim baru atau klaim yang tidak dapat diterima oleh

²⁴ Yongki, Gigih Prasisko. 2016. Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 03, No 02.

²⁵ George Ritzer dan Douglas J. Goodman. 2004. Teori Sosiologi Modern. Jakarta. Prenada Media

pemegang otoritas atau pihak-pihak yang ditentang lainnya. Aksi kolektif yang melawan merupakan basis dari gerakan sosial, karena aksi itu seringkali merupakan satusatunya sumber daya yang dimiliki oleh orang-orang awam dalam menentang pihak-pihak lain yang lebih kuat seperti negara. Gerakan sosial bisa beroperasi dalam batas-batas legalitas suatu masyarakat, namun bisa juga bergerak secara ilegal atau sebagai kelompok bawah tanah (*undergrounds groups*). Lalu kemudian, dalam sebuah gerakan sosial ada beberapa komponen-komponen yang harus ada dalam definisi gerakan sosial: 1. Kolektivitas orang yang bertindak bersama. 2. Tujuan bersama tindakannya adalah perubahan tertentu dalam masyarakat mereka yang ditetapkan partisipan menurut cara yang sama. 3. Kolektivitasnya relatif tersebar namun lebih rendah derajatnya daripada organisasi formal. 4. Tindakannya memunyai derajat spontanitas relatif tinggi namun tak terlembaga dan bentuknya tak konvensional.²⁶

1.6.2 Jaringan Sosial

Konsep Jaringan sosial merupakan hubungan-hubungan yang tercipta antar banyak individu dalam suatu kelompok ataupun antar suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Hubungan-hubungan yang terjadi bisa dalam bentuk yang formal maupun bentuk informal. Hubungan sosial adalah gambaran atau cerminan dari kerjasama dan koordinasi antar warga yang didasari oleh ikatan sosial yang aktif dan bersifat resiprosikal.²⁷ Konsep jaringan terdiri dari tiga dimensi utama yakni kepercayaan, norma, dan jaringan. Jaringan sosial dapat di bedakan dalam tiga jenis yaitu²⁸ :

- Pertama, Jaringan kepentingan, terbentuk dari hubungan-hubungan sosial yang bermuatan kepentingan.
- Kedua, Jaringan kekuasaan, hubungan-hubungan sosial yang membentuk jaringan bermuatan kekuasaan. Kekuasaan disini merupakan kemampuan seseorang atau unit sosial untuk mempengaruhi

²⁶ Singh, Rajendra. 2010. Gerakan Sosial Baru. Yogyakarta: Resist Book.

²⁷Damsar, MA, 2002. Sosiologi Ekonomi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

²⁸George Ritzer & Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, Jakarta, Prenada Media, 2004

perilaku dan pengambil keputusan orang atau unit sosial lainnya melalui pengendalian.

- Ketiga, Jaringan emosional, jaringan ini terbentuk atas dasar hubungan-hubungan sosial yang bermuatan perasaan emosional, misalnya; keluarga, pertemanan atau hubungan kerabat, dan sejenisnya.

Ketiga tipe jaringan sosial ini dalam kehidupan nyata sering kali berpotongan. Pertemuan-pertemuan tersebut membangkitkan suatu bagi pelaku yang bersangkutan karena struktur sosial dari masing-masing tipe jaringan berbeda atau belum sesuai satu sama lain. Oleh karena itu, seringkali terlihat kontradiksi antara tindakan-tindakan dengan sikap yang pelaku wujudkan. Jaringan sosial memiliki konsep menunjukkan suatu hubungan sosial yang diikat oleh adanya kepercayaan dan kepercayaan itu dipertahankan dan dijaga oleh norma-norma yang ada. Pada dasarnya jaringan sosial terbentuk karena adanya rasa saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, dan saling membantu dalam melaksanakan ataupun mengatasi sesuatu. Konsep jaringan sosial menilai bahwa setiap aktor (individual atau kelompok) memiliki akses berbeda terhadap sumber daya (kekayaan, kekuasaan, informasi). Berikut ini adalah dimensi-dimensi jaringan kebijakan yang dimaksud²⁹:

- Aktor dalam perumusan kebijakan berkaitan dengan jumlah orang yang terlibat. Faktor ini kemudian menentukan ukuran dari jaringan yang akan dibangun. Selanjutnya karakteristik jaringan kebijakan akan dipengaruhi oleh tipe aktor dari latar belakang yang berbeda-beda. Aktor dalam jaringan kebijakan merupakan individu-individu namun dapat juga berupa organisasi sebagaimana aktor yang terlibat dapat juga sebagai representasi dari kelompok atau pihak tertentu.
- Fungsi jaringan adalah media komunikasi yang berwujud dalam beberapa fungsi. Fungsinya bergantung pada kebutuhan, niat, sumber daya, dan strategi para aktoraktor yang terlibat. Konsep fungsi ini

²⁹ Ruddy Agusyanto, *Jaringan Sosial Dalam Organisasi*, Jakarta, Raja Grafindo, 2007

kemudian membentuk penghubung perspektif antara struktur dan aktor di dalam jaringan. Fungsi utama jaringan sosial adalah sebagai alat yang digunakan untuk meningkatkan intensitas hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu kebijakan publik baik pada tahapan formulasi maupun implementasi.

- Struktur jaringan kebijakan merujuk pada pola hubungan antar aktor-aktor yang terlibat.
- Tingkat pelebagaan merujuk pada karakteristik formal jaringan dan stabilitasnya. Hal ini akan bergantung pada bentuk atau karakteristik struktur jaringan dan semakin tinggi tingkat pelebagaan sebuah jaringan, semakin efektif pula jaringan kebijakan tersebut.
- Aturan bertindak atau norma dalam interaksi yang mengatur pertukaran dalam suatu jaringan. Hal ini bersumber dari persepsi peran, sikap, kepentingan dan latar belakang sosial dan pendidikan para aktor yang terlibat.
- Hubungan kekuasaan adalah Salah satu karakteristik utama dari jaringan kebijakan adalah power relation yang dapat dipahami melalui pengamatan terhadap pembagian kekuasaan. Proses ini berwujud fungsi distribusi sumber daya dan kebutuhan di antara aktor-aktor dan antara struktur-struktur organisasi ketika yang terlibat adalah organisasi.
- Strategi aktor dalam jaringan kebijakan, aktor-aktor menggunakan jaringan sebagai strategi untuk mengatur saling ketergantungan mereka. Mereka menciptakan dan atau menggunakan jaringan untuk memperoleh kebutuhan, kepentingan, dan tujuannya.

1.6.3 Pendidikan Anti Korupsi

Konsep pendidikan anti korupsi merupakan salah satu pilar yang menjadi strategi penting dalam upaya pencegahan korupsi. Lembaga pendidikan memiliki posisi sangat strategis dalam menanamkan mental antikorupsi. Dengan menanamkan mental anti korupsi sejak dini di lembaga pendidikan baik pada level dasar, menengah maupun tinggi, generasi penerus bangsa di negeri ini diharapkan memiliki pandangan yang tegas terhadap

berbagai bentuk praktik korupsi. Pembelajaran antikorupsi yang diberikan di berbagai level lembaga pendidikan, diharapkan dapat menyelamatkan generasi muda agar tidak menjadi penerus atau mewarisi tindakan korup yang dilakukan pendahulunya. Hal ini antara lain dapat dilakukan melalui pelaksanaan kurikulum anti korupsi. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan, selain itu Kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Dengan adanya pendidikan anti korupsi diharapkan setiap dari individu di dalam masyarakat dapat menumbuhkan karakter tegas pada tindak korupsi. Dalam pendidikan anti korupsi, hal-hal yang diajarkan adalah pendidikan moral seperti nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, peduli, adil, berani, mandiri, kerja keras, sederhana. Nilai-nilai ini dapat diwujudkan melalui pendidikan di lingkungan keluarga, sehingga peran sentral orang tua dalam mendidik seorang anak juga penting. Selain itu, pendidikan formal di sekolah juga memiliki peranan penting bagi membentuk karakter seorang individu. Pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam tingkat keberhasilan upaya pemberantasan korupsi melalui mencegah. Sebab penanaman karakter-karakter kejujuran dapat diajarkan dan dilakukan sejak dini, sehingga apabila telah dipahami dan diaplikasikan sejak anak-anak maka karakter ini dapat terus dibawa sampai nanti ketika dewasa. Pendidikan anti korupsi tidak hanya selalu menargetkan pada siswa-siwi atau mahasiswa di perguruan tinggi, melainkan bisa oleh siapa saja dan melakukannya pun dimana saja. Sebab pendidikan anti korupsi bukan mengenai teori, materi dan definisi dari korupsi tetapi lebih kepada pemahaman dalam karakter individu masing-masing seseorang agar tidak melakukan tindakan tersebut, sehingga ajaran sembilan kejujuran pun masih relevan bagi siapapun dan sampai kapanpun. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi masih menjadi strategi utama dalam pencegahan korupsi yang paling efektif.

Tabel 1. 1 Model Penanaman Nilai Anti Korupsi

No	Model	Keterangan
1.	Sebagai Mata Pelajaran Tersendiri	Pendidikan anti korupsi disampaikan sebagai mata pelajaran tersendiri seperti bidang studi yang lain
2.	Terintegrasi dalam Semua Mata Pelajaran	Pendidikan anti korupsi disampaikan secara Terintegrasi dalam semua mata pelajaran
3.	Di Luar Pembelajaran	Penanaman nilai anti korupsi ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran
4.	Pembudayaan pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah	Penanaman nilai-nilai anti korupsi ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah
5.	Gabungan	Menggunakan gabungan antara model terintegrasi dan di luar pembelajaran secara bersama-sama

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi dapat terbentuk, mengembangkan dan mengorganisasikan jaringan dalam membantu kekuatan organisasi, dan mencapai tujuannya dalam mewujudkan Pendidikan Anti Korupsi di Surabaya. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui bagaimana proses terbentuknya gerakan tersebut hingga apa yang menjadi latar belakang gerakan ini dalam mewujudkan pendidikan anti korupsi di Surabaya hingga bagaimana hasil yang telah dicapai dari adanya gerakan ini. Jadi fokus utama dari penelitian ini adalah terletak pada bagaimana latar belakang, proses dan bagaimana dinamika yang terjadi pada gerakan sosial tersebut dan hasil yang telah dicapai selama ini.

1.7.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif ilmu politik. Penelitian ini akan melihat sebuah fenomena secara lebih mendalam. Hasil dari penelitian ini akan secara khusus dan spesifik dari data-data pendukung baik dari buku, literatur maupun internet dan wawancara mendalam dengan narasumber. Jenis penelitian kualitatif deskriptif memahami secara mendalam sudut pandang subyek penelitian. Penelitian ini akan mengidentifikasi sebuah fenomena, dengan mengkaji sesuai dengan fokus penelitian, lalu menyajikan hasil temuan data dan menganalisis sesuai dengan teori dan studi ilmu politik sesuai dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan tipe ini agar mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah diajukan dengan secara spesifik dan mendalam, hingga menjelaskan sebuah fenomena permasalahan penelitian ini.³⁰

1.7.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan pihak-pihak yang akan menjadi informan sekaligus narasumber dalam memperoleh data penelitian. Informan atau narasumber diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan data akurat untuk penelitian ini. Berikut ini adalah subyek yang akan ditujukan untuk menjadi syarat data dalam penelitian ini :

No.	Nama Narasumber	Bagian dan Institusi Narasumber
1.	Maria Kresentia	Direktur SPAK Indonesia
2.	Yulia Fransiska	Koordinator Gerakan SPAK Wilayah Jawa Timur
3.	Umi Kulsum	Koordinator Gerakan SPAK Wilayah Surabaya
4.	Vieta Cornelia	Anggota Gerakan SPAK Surabaya
5.	Dinie Wardani	Anggota Gerakan SPAK Surabaya
6.	Iswati	Kepala Bagian Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kota Surabaya
7.	Munaiyah	Kepala Bagian Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kota Surabaya

³⁰Harrison, Lisa. 2016. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana. Hlm 86.